

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN APBD KOTA BANDUNG

#### 3.1. Gambaran Umum Perekonomian Kota Bandung

##### 3.1.1. Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung terletak diwilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107°36 Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Lokasi kota Bandung terletak cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, dan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu:<sup>109</sup>

- a. Barat-Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara
- b. Utara-Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan Subang dan Pangalengan)

Secara *topografis* kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter di atas permukaan laut (ldp), titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah didaerah Selatan 675 Meter diatas permukaan laut. Di wilayah Bandung Selatan sampai lajur lintas kereta api, permukaan tanah relatif datar sedangkan di wilayah bagian Utara berbukit-bukit. Dari wilayah perbukitan Bandung Utara inilah orang dapat menyaksikan bentuk dan panorama keseluruhan kota Bandung.<sup>110</sup>

Keadaan georafis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya lapisan *alluvial* hasil letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian unumnya merupakan jenis *andosol*, di bagian selatan serta di bagian timur terdiri

---

<sup>109</sup> Bandan Pusat Statistik, *Bandung Dalam Angka 2014*, hal 3

<sup>110</sup> *Ibid*, hal 3

atas sebaran jenis *alluvial* kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah *andosol*.

Selama tahun 2013 tercatat suhu tertinggi kota Bandung mencapai 30,1°C yang terjadi pada bulan September, suhu terendah di kota Bandung pada tahun 2013 adalah 18,5°C yaitu pada bulan Agustus.<sup>111</sup>

### 3.1.2. Laju Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk

Penduduk kota Bandung tahun 2013 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah adalah 2.483.977 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.260.565 orang dan penduduk perempuan kota Bandung sebanyak 1.223.412 orang. Jumlah rumah tangga kota Bandung tahun 2013 adalah sebanyak 661.194 rumah tangga dengan jumlah rata-rata 4 jiwa perumah tangga.<sup>112</sup>

Rata-rata kepadatan penduduk kota Bandung 14.847 jiwa/Km<sup>2</sup>, dilihat dari segi kepadatan penduduk per kecamatan, maka kecamatan Bojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 39.738 jiwa/Km<sup>2</sup>.

### 3.1.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah salah satu modal bagu geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya dinamikan penduduk. Dari survei Angka Kerja Nasional 2011-2013 diketahui bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kota Bandung pada tahun 2013 adalah 63,61%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2013 adalah 10,98%.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> *ibid*

<sup>112</sup> *Ibid*, hal 39

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 41

Adapun perincian jenis kelamin dan lapangan usaha utama di kota Bandung diantaranya:<sup>114</sup>

- a. Pertanian: laki-laki 16.487 jiwa, perempuan 4.781 jiwa, dengan jumlah 21.278 jiwa.
- b. Industri: laki-laki 143.054 jiwa, perempuan 74.122 jiwa, dengan jumlah 217.176 jiwa.
- c. Perdagangan: laki-laki 195.197 jiwa, perempuan 137.637 jiwa, dengan jumlah 332.835 jiwa.
- d. Jasa: laki-laki 166.732 jiwa, perempuan 103.136 jiwa, dengan jumlah 269.868 jiwa
- e. Lainnya: laki-laki 11.116 jiwa, perempuan 46.720 jiwa, dengan jumlah 237.836 jiwa.

### **3.1.4. Laju Pertumbuhan Perekonomian Kota Bandung**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2008–2012) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2008 LPE kota Bandung mencapai 8,17%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 8,98%.<sup>115</sup>

LPE kota Bandung tahun 2012 dalam konteks regional Jawa Barat merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Di posisi kedua ada kota Depok yang memiliki LPE sebesar 7,15% dan kemudian disusul oleh kota Bekasi dengan LPE sebesar 6,85%. Hal ini mengindikasikan

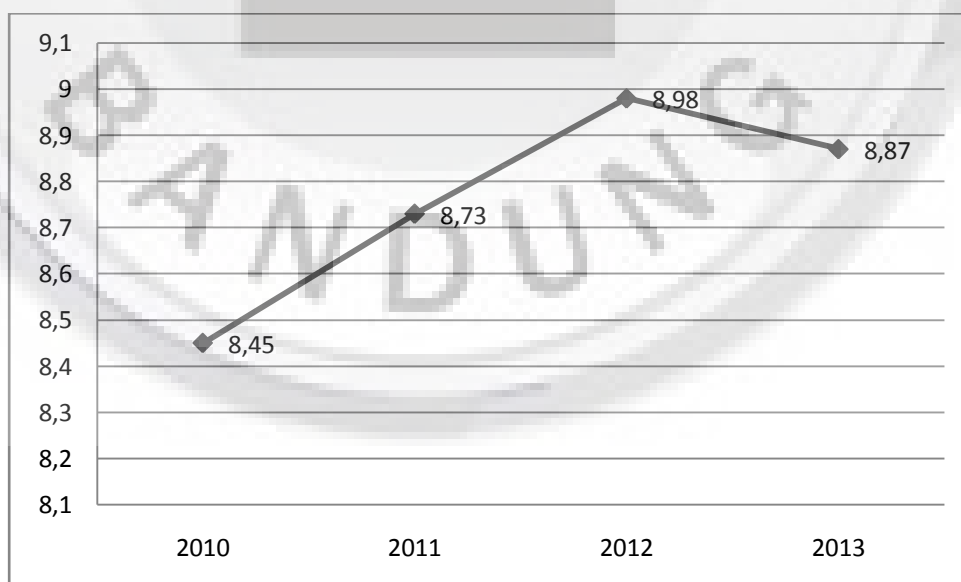
<sup>114</sup> *Ibid*, hal 57

<sup>115</sup> Bappeda Kota Bandung, *Perekonomian Kota Bandung Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan BAPPEDA Kota Bandung*, hal 12

bahwa kota Bandung memiliki akselerasi ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.<sup>116</sup>

Perlambatan ekonomi yang terjadi di kota Bandung jika dilihat dari sisi lapangan usaha (penawaran) dari 8,98 % pada tahun 2012 menjadi 8,87% pada tahun 2013 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan beberapa sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang paling mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel, dan restoran berdampak besar bagi perlambatan LPE kota Bandung, dikarenakan besarnya share sektor ini terhadap perekonomian kota Bandung. Peningkatan harga BBM pada bulan Juni 2013 juga memiliki dampak dalam melambatnya kinerja beberapa sektor ekonomi.

Grafik 3.1. Laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tahun 2010-2013



Sumber: BAPPEDA kota Bandung

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 14

Perkembangan ekonomi wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator makro. Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi regional adalah dengan melihat nilai dan pertumbuhan PDBR. PDBR kota Bandung didasarkan atas harga berlaku dan harga konstan tahun 2000. PDBR kota Bandung yang dihitung atas dasar harga berlaku dari tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilai absolut PDBR kota Bandung atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp 130.209.649 juta. Sementara pada tahun 2012 nilai absolut PDBR kota Bandung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 111.121.551 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan Rp 19.088.098 juta. Dengan demikian secara nominal terjadi peningkatan PDBR atas dasar harga berlaku sebesar 17,18%.<sup>117</sup>

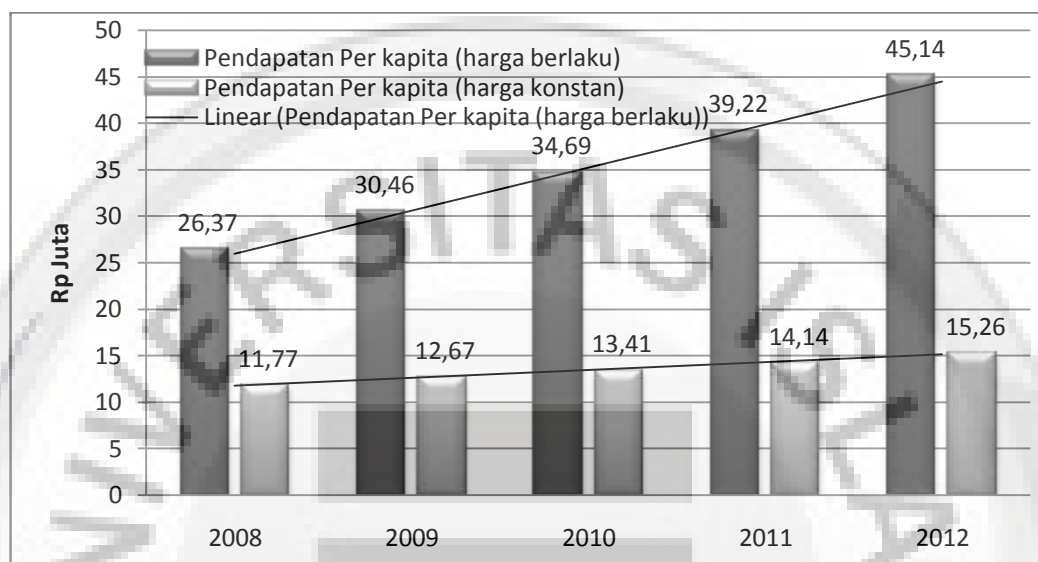
Pendapatan per kapita riil (PDRB per kapita atas dasar harga konstan) merupakan salah satu indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan pendapatan per kapita kota Bandung menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 pendapatan per kapita hanya mencapai Rp11,8 juta/orang, pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp15,3 juta/orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 29,6%. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita (atas

---

<sup>117</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Bandung dalam Angka 2014*, hal 237

dasar harga konstan) kota Bandung berada di atas level provinsi Jawa Barat dan nasional.<sup>118</sup>

Grafik 3.2. Pendapatan perkapita kota Bandung 2008-2012



Sumber: BAPPEDA kota Bandung

Selain itu secara umum indikator makro ekonomi kota Bandung periode 2008-2012 juga menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kota Bandung menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.<sup>119</sup>

Kota Bandung selama periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Jika pada tahun 2008 tingkat inflasi cukup tinggi, yaitu mencapai 10,23%, pada tahun 2012 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 4,02%. Namun pada tahun 2013 tingkat inflasi kota Bandung mengalami kenaikan lagi menjadi 7,97%. Dampak kenaikan BBM bersubsidi sangat terasa pada Juli dan Agustus 2013, namun mereda pada

<sup>118</sup> Bappeda Kota Bandung, *Perekonomian Kota Bandung Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan BAPPEDA Kota Bandung*, hal 35

<sup>119</sup> *ibid*

September 2013. Tekanan inflasi semakin meningkat dengan dorongan tekanan inflasi dari komoditas pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H. (sumber: “Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten), Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat, Triwulan III 2013”) <sup>120</sup>

### 3.2. Sektor Ekonomi Kreatif Kota Bandung

Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian kota dan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat baik penjual maupun pembeli. Hal-hal penting dalam perdagangan seperti mutu produk dan pemasaran merupakan kunci dalam rangka peningkatan volume perdagangan. Disamping itu juga campur tangan pemerintah dalam menyusun sistem tata niaga dan distribusi barang agar jaminan dan kepastian untuk menciptakan iklim usaha yang berdaya saing, terutama untuk ekspor. <sup>121</sup>

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kota Bandung memiliki potensi yang besar untuk menunjang perkembangan kegiatan kreatif, sehingga pada tahun 2007 kota Bandung terpilih sebagai pilot proyek kota kreatif se-Asia Timur. Perkembangan sektor ekonomi

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>121</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Bandung Dalam Angka 2014*, hal 171

kreatif di kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Industri kreatif di kota Bandung berdasarkan data Dinas KUKM Indag kota Bandung tahun 2013 yang lalu, jumlahnya adalah sebanyak 1078 kelompok usaha yang terdistribusi ke dalam 15 kategori industri kreatif.<sup>122</sup>

Tabel 3.3. Ditribusi industri kreatif menurut jenisnya di kota Bandung

Jenis Industri	Jumlah
Arsitektur	3
Design	24
Fashion	205
Kerajinan	488
Kuliner	153
Layanan komputer	7
Musik	3
Pasar dan Barang seni	21
Penerbitan dan percetakan	9
Periklanan	93
Permainan interaktif	1
Riset dan pengembangan	1
Seni pertunjukan	2
Tv dan radio	61
Vidio, film dan fotografi	7
Total perkecamatan	1078

Sumber: BAPPEDA kota Bandung

<sup>122</sup> Bappeda Kota Bandung , *Perekonomian Kota Bandung Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan BAPPEDA Kota Bandung*, hal 38



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kerajinan merupakan jumlah terbanyak dalam ekonomi kreatif di kota Bandung. Usaha kreatif kota Bandung dapat kita estimasikan profit dan potensi pajak daerah. Dari pajak tersebut dapat meningkatkan pendapatan kota Bandung. Adapun estimasi profit dan potensi pajak daerah dari industri kreatif kota Bandung pada tahun 2012 sebagai berikut:<sup>123</sup>

Tabel 3.4. Estimasi profit dan potensi pajak daerah dari industri kreatif kota Bandung 2012

Jenis Industri Kreatif	Nilai Estimasi Investasi (Rupiah)	Estimasi %Profit Investasi Tahunan	Estimasi Nilai Profit Tahunan	Potensi Pajak (PPN 10%)
Arsitektur	4.254.784.900	0,25	1.063.696.225	106.369.622
Design	6.324.597.966	0,33	2.055.494.339	205.549.434
Fashion	62.512.643.599	0,15	9.376.896.540	937.689.654
Kerajinan	34.761.852.522	0,30	10.428.555.757	1.042.855.575
Kuliner	22.839.026.265	0,40	9.135.610.506	913.561.051
Layanan komputer	222.670.791	0,35	14.780.034.777	1.478.003.478
Musik	1.073.424.750	0,50	536.712.375	53.671.238
Pasar dan Barang Seni	10.152.841.267	0,25	2.538.210.317	253.821.032
Penerbitan dan Percetakan	2.315.816.148	0,15	347.372.422	34.737.242
Periklanan	29.290.350.000	0,35	10.251.622.500	1.025.162.250

<sup>123</sup> *Ibid*, 41

Permainan Interaktif	123.328.919	0,45	55.498.014	5.549.801
Riset dan Pengembangan	328.964.522	0.18	57.568.014	5.756.879
Seni Pertunjukan	138.160.000	0,15	20.724.000	2.072.400
Tv dan Radio	380.381.360.000	0,50	190.190.680.000	19.019.068.000
Vidio, Film, dan Fotografi	1.045.507.400	0,25	261.376.850.	26.137.685
Total	597.771.329.049	5	251.1000.053.412	25.110.005.341

Sumber: BAPPEDA kota Bandung

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Tv dan Radio mempunyai estimasi investasi yang paling besar, karena teknologi dan bisnis merupakan dua sejoli yang dapat merubah dunia. Hambatan sebesar apapun, ketika datang kepentingan bisnis dengan membawa kendaraan teknologi maka regulasi tidak lagi dapat dikatakan penting. Ketika pemerintah belum merestui siaran tv dan radio namun disisi lain teknologi dan bisnis sudah menyatu dikemas oleh kepentingan hiburan, pendidikan, dan aktualisasi diri.

### 3.3. Permasalahan Pembangunan Perekonomian Kota Bandung

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan sruktur kegiatan ekonominya.

Permasalahan ekonomi yang terjadi disuatu pemerintahan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di kota Bandung permasalahan ekonomi dapat memperlambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan pembangunan perekonomian di kota Bandung sebagai berikut:<sup>124</sup>

I. Urusan Tenaga kerja

1. Belum terpenuhinya kebutuhan modal dan peralatan pasca pelatihan untuk menjadi wirausaha baru/mandiri.
2. Manajemen pada UPT Balai Latihan Kerja belum optimal.
3. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap budaya kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

II. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

1. Tingkat keterampilan SDM dan kemampuan mengakses pasar pada koperasi produksi dan jasa masih lemah.
2. Terbatasnya kemampuan/keterampilan SDM pengelola koperasi konsumen.
3. Terbatasnya kemampuan SDM dan pengelolaan KSP/USP koperasi dalam bidang akuntansi koperasi.
4. Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM koperasi.
5. Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan KUKM.
6. Terbatasnya pemasaran produk UKM.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, 64-67

### III. Urusan Perdagangan

1. Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produk.
2. Terbatasnya informasi prosedur dan aturan ekspor.
3. Terbatasnya frekuensi promosi/misi dagang keluar negeri.
4. Distribusi barang impor di Kota Bandung belum terdeteksi secara keseluruhan.
5. Lemahnya pemahaman PKL terhadap Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011
6. Kurangnya sarana untuk kegiatan penyidikan bagi PPNS - PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Perlindungan Konsumen).
7. Tidak teralokasikannya anggaran biaya uji laboratorium.
8. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan waralaba di Kota Bandung.

### IV. Urusan Perindustrian

1. Terbatasnya lahan peruntukan kegiatan industri.
2. Belum optimalnya daya saing produk industri baik dalam maupun luar negeri.
3. Bahan baku industri masih didatangkan dari luar Kota Bandung.
4. Penggunaan mesin produksi masih sederhana.
5. Terbatasnya pemasaran.
6. Terbatasnya produk yang bersertifikat halal.

### 3.4. Laju Peningkatan APDB Kota Bandung

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Ringkasan perubahan APBD Kota Bandung berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, *Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan*, hal 2

Tabel 3.5. Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 s.d. 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian		2008	2009	2010	2011	2012
<b>PENDAPATAN</b>		<b>1,962,782</b>	<b>2,286,658</b>	<b>2,493,859</b>	<b>3,051,132</b>	<b>3,609,910</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>338,377</b>	<b>369,138</b>	<b>416,031</b>	<b>719,989</b>	<b>933,921</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	213,161	255,507	291,800	546,000	727,000
2	Hasil Retribusi Daerah	91,692	81,759	91,811	73,091	71,175
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,150	7,251	8,838	10,265	10,270
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29,374	24,622	23,583	90,630	125,477
<b>DANA PERIMBANGAN</b>		<b>1,290,696</b>	<b>1,370,520</b>	<b>1,571,977</b>	<b>1,429,762</b>	<b>1,794,297</b>
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	317,014	335,665	511,414	365,042	433,568
2	Dana Alokasi Umum	965,517	989,246	997,019	1,005,643	1,323,682
3	Dana Alokasi Khusus	8,166	45,610	63,545	59,077	37,048
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>38,746</b>	<b>547,000</b>	<b>505,853</b>	<b>899,244</b>	<b>881,693</b>
1	Pendapatan Hibah				7,500	
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	294,852	332,455	325,159	435,069	456,197
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus			54,988	363,374	293,696
4	Bantuan Keuangandari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		214,546	125,706	163,530	131,801
<b>BELANJA</b>		<b>2,260,410</b>	<b>2,498,897</b>	<b>2,855,134</b>	<b>3,312,197</b>	<b>3,864,670</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1,370,809</b>	<b>1,391,774</b>	<b>1,653,599</b>	<b>1,919,950</b>	<b>2,167,731</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>889,601</b>	<b>1,107,123</b>	<b>1,201,535</b>	<b>1,392,248</b>	<b>1,696,940</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-297,628</b>	<b>-212,239</b>	<b>-361,275</b>	<b>-261,066</b>	<b>-254,760</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>315,857</b>	<b>276,160</b>	<b>374,970</b>	<b>278,946</b>	<b>293,760</b>
1	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	298,357	258,660	372,470	276,446	293,760
2	Penerimaan kembali pinjaman	2,500	2,500	2,500	2,500	
3	Penerimaan kembali investasi	15,000	15,000			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>18,229</b>	<b>63,921</b>	<b>13,695</b>	<b>17,880</b>	<b>39,000</b>
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,000	62,000	10,000	12,500	31,000
2	Pembayaran Pokok Utang'	5,229	1,921	3,695	5,380	8,000
Pembiayaan Netto		<b>297,628</b>	<b>212,239</b>	<b>361,275</b>	<b>261,066</b>	<b>254,760</b>

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung

Pendapatan Daerah Kota Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2008 sampai dengan 2012. Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi PAD Kota Bandung yang sebesar 27,43% di Tahun 2012 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada di kisaran 8,4% di Tahun 2012.<sup>126</sup>

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2009-2013 sebesar 16,5%. Dana Perimbangan, walaupun kontribusinya besar, namun rata-rata pertumbuhan per tahun adalah yang paling kecil, yaitu 8,1%. PAD Kota Bandung mulai tahun 2011 tampak melonjak tinggi. Penyebabnya bukan pola normal pertumbuhan PAD, tetapi adanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Bawah Tanah yang kemudian masuk sebagai PAD Pemerintah Kota Bandung. Bila PAD dihitung dengan tambahan tersebut, maka rata-rata optimistis yang diperoleh dari pertumbuhan PAD tahun 2009-2013 sangat tinggi, yaitu 36,6% per tahun. Namun, bila pertumbuhan PAD sesungguhnya (tanpa tambahan BPHTB dan pajak ABT), dihitung, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhannya 17,7%.<sup>127</sup>

PAD Kota Bandung, kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Daerah, yaitu rata-rata 73,5% di tahun 2009-2013. Sumber PAD lainnya adalah dari Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi sekitar 15,7% dan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,8%.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 3-4

<sup>127</sup> *Ibid*, hal 16-17

Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari Pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kota Bandung masih belum mandiri. Namun demikian, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, maka kontribusi PAD Kota Bandung terhadap APBD-nya tergolong sangat tinggi. Artinya banyak sekali daerah lain yang jauh tidak mandiri dari sisi sumber pendapatan. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidak pastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran Dana Perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kota Bandung, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan.

### **3.5. Rancangan Perekonomian Kota Bandung**

Rencana pembangunan perekonomian Kota Bandung diprioritaskan pada<sup>128</sup>

:

1. Perekonomian Kota Bandung yang kokoh, dengan sasaran :
  - a. Terjaganya pertumbuhan ekonomi
  - b. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri
  - c. Meningkatnya pendapatan asli daerah

---

<sup>128</sup> Bappeda Kota Bandung , *Perekonomian Kota Bandung Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan BAPPEDA Kota Bandung*, hal 73



- d. Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik
  - e. Meningkatnya sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah
2. Perekonomian Kota Bandung yang maju, dengan sasaran :
- a. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
  - b. Berkembangnya koperasi dan UMKM
  - c. Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing
3. Perekonomian Kota Bandung yang berkeadilan, dengan sasaran :
- a. Meningkatkan kesempatan kerja
  - b. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Adapun proyeksi kapasitas kemampuan keuangan Kota Bandung selama lima tahun (2014 – 2018) adalah sebagai berikut :<sup>129</sup>

Tabel 3.6. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi				
	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan	4,827	5,51	6,223	6,966	7,751
Sisa Lebih (Rii) Pembiayaan Anggaran (*)	427,4	330,6	373,38	417,96	465,06
Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	5.254,40	5.840,60	6.596,38	7.383,96	8.216,06

\*Enam persen dari pendapatan

Sumber: BAPPEDA kota Bandung

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 71

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan tersebut, Kota Bandung memproyeksikan perkembangan pendapatan dan pembelanjaan daerah periode 2014 – 2018 sebagai berikut :<sup>130</sup>

Tabel 3.7. Proyeksi Perkembangan Pendapatan Tahun 2014 - 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian Pendapatan	PROYEKSI					Rata-rata pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
PENDAPATAN DAERAH	4,827	5,510	6,223	6,966	7,751	12.58
PAD	1,763	1,977	2,220	2,494	2,808	12.34
Pajak Daerah	1,400	1,608	1,845	2,113	2,421	14.92
Retribusi Daerah	138	140	142	144	146	1.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19	20	21	22	23	4.89
Lain-lain pendapatan yang sah	206	209	212	215	218	1.44
Dana Perimbangan	2,011	2,374	2,737	3,101	3,464	14.59
Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	276	358	442	527	610	22.04
DAU	1,672	1,941	2,211	2,479	2,750	13.26
DAK	63	75	84	95	104	13.40
Lain-lain pendapatan yang sah	1,053	1,159	1,266	1,371	1,479	8.87
Hibah	15					
Dana bagi hasil pajak provinsi (PKB, BBNKB, Pajak bahan bakar)	621	653	685	717	750	4.83
Dana penyesuaian otonomi khusus	417	506	581	654	729	15.05

Sumber: BAPPEDA kota Bandung

<sup>130</sup> *Ibid*, hal 69

Dari proyeksi pendapatan di atas diharapkan bahwa Bandung bisa lebih meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai macam sektor, diharapkan pendapatan daerah dapat disalurkan kepada masyarakat dan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kota Bandung.

Seperti yang telah di programkan di Program Strategi kota Bandung dalam portal resmi kota Bandung diantaranya:<sup>131</sup>

A. Stategi Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya manusia yang Handal dan Religius

- 1 Kebijakan : Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan serta pelayanan keagamaan baik seluruh masyarakat.
- 2 Program-program pembangunan
  - f. Program Pendidikan dasar Pra Sekolah
  - g. Program Pendidikan Menengah
  - h. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
  - i. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
  - j. Program Lingkungan sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  - l. Program Pengawasan Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya
  - m. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
  - n. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

---

<sup>131</sup> Bandung.go.id

## B. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil

1. Kebijakan : Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasis potensi daerah.
2. Program-program pembangunan
  - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri
  - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
  - e. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
  - f. Program Pembinaan Usaha Kecil
  - g. Program Peningkatan Investasi Kota
  - h. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - i. Program Pengembangan Produk Kepariwisata
  - j. Program Pengembangan Agrobisnis

## C. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang Ramah dan Berkesadaran serta Berhati Nurani

1. Kebijakan : Mendorong Peningkatan integrasi, ketahanan dan kepedulian sosial masyarakat.
2. Program-program pembangunan
  - a. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat beragama
  - b. Program Pembinaan, Pengembangan Produktifitas dan perlindungan Tenaga Kerja
  - c. Program pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial

- d. Program Pemberdayaan Perempuan
- e. Program Pelayanan Kependudukan
- f. Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- g. Program Pengembangan Seni Budaya Daerah

#### D. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Penataan Kota

1. Kebijakan : Mengungkapkan peruasan dan penetapan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Program-program pembangunan
  - a. Program Pengembangan Kawasan Gedebage
  - b. Program Penataan Prasarana dan Sarana
  - c. Program Penataan Transportasi Kota
  - d. Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
  - e. Program Penataan Lingkungan Permukiman
  - f. Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah
  - g. Program Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Pemerintah Kota

Dalam program penataan kota, kota Bandung saat ini sudah memiliki 406 taman dan 40 diantaranya di jadikan sebagai taman tematik. Wali kota Bandung membenahi kota dengan memiliki banyak taman dengan tujuan sosial yang sangat besar. Beliau menciptakan berbagai macam taman tematik dengan tujuan agar warga bandung memiliki lahan untuk saling bersilaturahmi ditempat yang lebih nyaman dengan udara yang segar.

Dalam Islam sangat jelas bahwa saling menjaga silaturahmi adalah kewajiban sesama muslim. Seperti yang telah difirman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

E. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

1. Kebijakan : Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan , pelaksanaan serta pengendalian pengawasan pembangunan kota.
2. Program-program pembangunan
  - a. Program Peningkatan Perencanaan Kota
  - b. Program Peningkatan Hukum
  - c. Program Peningkatan Prasarana dan sarana aparatur Pemerintah Kota
  - d. Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota
  - e. Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - f. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan

- g. Program Pelayanan Prima
- h. Program Peningkatan Partisipasi Politik
- i. Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Kota
- j. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

F. Strategi Dalam rangka Mengembangkan Sistem Keuangan Kota

1. Kebijakan : Mendoronga sistem keuangan kota yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Program-program pembangunan
  - a. Program Peningkatan Sistem Pembiayaan pembangunan
  - b. Program Peningkatan Kinerja BUMD
  - c. Program Pengembangan Kemitraan

Tabel 3.8. Proyeksi Perkembangan Pendapatan Tahun 2014 – 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	Jenis Dana	ALOKASI									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
<b>1</b>	<b>Prioritas I</b>	<b>38.05</b>	<b>1,999,407.33</b>	<b>42.66</b>	<b>2,491,677.48</b>	<b>43.81</b>	<b>2,889,926.63</b>	<b>45.45</b>	<b>3,356,069.57</b>	<b>47.54</b>	<b>3,905,801.20</b>
	Belanja Tidak Langsung	35.84	1,882,930.56	40.48	2,364,035.93	41.86	2,761,108.68	43.69	3,226,063.43	45.94	3,774,595.00
	Belanja Langsung	2.22	116,476.77	2.01	117,641.55	1.80	118,817.95	1.63	120,006.14	1.48	121,206.20
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0.17	10,000.00	0.15	10,000.00	0.14	10,000.00	0.12	10,000.00
<b>2</b>	<b>Prioritas II</b>	<b>49.37</b>	<b>2,594,155.06</b>	<b>45.07</b>	<b>2,632,552.52</b>	<b>44.40</b>	<b>2,929,083.37</b>	<b>43.03</b>	<b>3,177,520.43</b>	<b>41.04</b>	<b>3,371,888.80</b>
<b>3</b>	<b>Prioritas III</b>	<b>12.58</b>	<b>660,837.61</b>	<b>12.27</b>	<b>716,370.00</b>	<b>11.78</b>	<b>777,370.00</b>	<b>11.52</b>	<b>850,370.00</b>	<b>11.42</b>	<b>938,370.00</b>
	Belanja Tambahan Penghasilan	4.87	255,956.05	5.26	307,000.00	5.58	368,000.00	5.97	441,000.00	6.44	529,000.00
	Belanja Subsidi )*	1.87	98,000.00	1.76	102,870.00	1.56	102,870.00	1.39	102,870.00	1.25	102,870.00
	Belanja Hibah	3.71	195,020.57	3.34	195,000.00	2.96	195,000.00	2.64	195,000.00	2.37	195,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	1.91	100,546.00	1.71	100,000.00	1.52	100,000.00	1.35	100,000.00	1.22	100,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	0.02	815	0.02	1,000.00	0.02	1,000.00	0.01	1,000.00	0.01	1,000.00
	Belanja Tidak Terduga	0.20	10,500.00	0.18	10,500.00	0.16	10,500.00	0.14	10,500.00	0.13	10,500.00
	<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>5,254,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,840,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,596,380.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,383,960.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,216,060.00</b>

Sumber: BAPPEDA kota Bandung.